

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Z., Andreas, H., Gumilar, I., Sidiq, T. P., & Fukuda, Y. (2013). Land subsidence in coastal city of Semarang (Indonesia): Characteristics, impacts and causes. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 4(3), 226–240.
- Amalia, P., Suprayogi, Y., Azis, Y., Hermawan, W., Pamungkas, E., Nurzaman, A., & Priyono, A. F. (2021). Analisis dampak ekonomi dan sosial pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 4(1), 1–11.
- Ayuni, Q. N., & Sariffuddin, S. (2019). Dampak sosial-spasial pembangunan jalan tol terhadap masyarakat Kota Semarang (Studi kasus: Jalan Tol Semarang-Solo). *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), 1–12
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Panjang jalan kabupaten menurut kondisi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Batubara, B., Prabowo, H., Ichwan, M., & Syukron, M. (2021). *Maleh dadi segoro: Krisis sosial-ekologis kawasan pesisir Semarang-Demak*. Lintas Nalar.
- Biruni, E. S. M., & Kurniawati, W. (2021). Tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Sayung terhadap rencana pengintegrasian pembangunan tanggul laut dengan Jalan Tol Semarang–Demak. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah dan Kota)*, 10(2), 117–126.

- Cahyani, L. E., dkk. (Tahun). *Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal (Studi kasus kerusakan jalan)*.
- Darmawan, A. (2018). *Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa*. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 6(2), 45–58.
- Firmansyah, D. (2023). *Dampak pengadaan tanah Jalan Tol Semarang–Demak Seksi II terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan* (Skripsi, Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).
- Hamka, M. A. (2023). Dampak sosial-ekonomi pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja terhadap masyarakat terdampak di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 45–58.
- Haris, A. (2009). *Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 1–13.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Hudalah, D., & Firman, T. (2012). Beyond property: Industrial estates and post-suburban transformation in Jakarta Metropolitan Region. *Cities*, 29(1), 40–48.
- Jamaludin, H., & Mahdi, Z. (2025). Perlawanan masyarakat terhadap pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang–Demak. *Jurnal Sains Akademik*, 2(4), 1046–1065.

- Jessop, B. (2016). *The state: Past, present, future*. Polity Press.
- Levien, M. (2013). Regimes of dispossession: From steel towns to special economic zones. *Development and Change*, 44(2), 381–407.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). *Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–236.
- Rachbini, D. J. (2002). *Ekonomi politik: Paradigma dan teori pilihan publik*. Ghalia Indonesia.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy* (2nd ed.). Dorsey Press.
- Riyanto, A., Lituhayu, D., & Djumiari, D. (2022). Komunikasi sosial dalam implementasi proyek strategis nasional Tol Tanggul Laut Semarang-Demak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 1–18.
- Simandjuntak, D. H. (2020). Infrastruktur dan tata kelola pembangunan di Indonesia: Pelajaran dari proyek-proyek strategis nasional. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(2), 135–160.

- Sumadiasa, I. K., Tisnawati, N. M., & Wirathi, I. G. A. P. (2016). *Analisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 5(2), 111–128.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.